



Semua Janji

Pemerintah Bersih

Debat Publik Pilgub Kalbar



Termasuk di
antaranya para
pendukung
masing-masing
paslon juga tertib
mengikuti jalannya
debat dari awal
hingga akhir

Ramdan
Ketua KPU Kalbar

PONTIANAK, TRIBUN -
Debat publik antar pasang-
an calon (Paslon) Guber-
nur-Wakil Gubernur Kal-
bar kembali digelar, Kamis
(21/6) di Ballroom Aston
Pontianak. Debat kali ini

mengusung tema, Politik,
Hukum, Pemerintahan
yang baik dan kualitas per-
tumbuhan ekonomi daerah.

Cagub Kalbar nomor urut
1 Milton Crosby menyata-
kan jika terpilih menjadi
Gubernur Kalbar berkom-
itmen mewujudkan pe-
merintahan yang bersih,
akuntable, transparan, dan
berwibawa.

Milton mengatakan hal
tersebut dapat dilakukan
dengan setiap penyelengga-
raan pemerintahan sesuai
dengan prosedur dan tidak
melakukan penyimpang-
an dengan aturan keuang-
an dalam setiap kebijakan
yang akan diambil.

"Hal yang paling penting
bahwa saya dan Pak Boy
telah sepakat untuk tidak
melibatkan keluarga serta
kroni-kroni untuk mengu-

■ Bersambung ke hal. 7



rus kegiatan proyek pemerintah,” ujarnya.

Ia mengatakan hal tersebut sudah dilakukannya selama kurun waktu 10 tahun saat menjabat sebagai bupati sintang. “Silahkan cek di Sintang. Keluarga dan anak saya tidak ada ikut bermain proyek pemerintah,” ujarnya.

Jika diamanahkan sebagai pemimpin Kalbar, Milton mengatakan akan tegas terhadap proses penyelenggaraan proyek pemerintah satu di antaranya ketegasannya adalah tidak akan ada istilah fee dalam kegiatan proyek. “Hal tersebut untuk memastikan kualitas terjamin dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat,” ujarnya.

Milton juga berjanji menata kembali wilayah pemerintahan dengan mempercepat proses pembentukan daerah otonomi baru Kapuas Raya, dan beberapa daerah kabupaten lain. Ia menambahkan mewujudkan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, peredaran narkoba, dan trafficking.

Sementara itu menjawab pertanyaan soal rentang kendali pengelolaan pendidikan jenjang SMA yang telah ditarik oleh Pemerintah Provinsi, Milton memaparkan dirinya akan mengadu kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini untuk merevisi undang-undang yang mengatur tentang penerikan kewenangan urusan pendidikan jenjang SMA ke pemerintah provinsi. Sehingga, kewenangan urusan pendidikan jenjang SMA dapat dikembalikan ke kabupaten/kota.

“Kita akan berusaha untuk mengembalikan kewenangan pendidikan SMA ke bupati. Bupati belum mengelola pendidikan SMA lebih baik apalagi kalau diurus Pemerintah provinsi dengan cakupan wilayah yang lebih luasnya setara dengan Jawa dan Bali,” ujarnya.

Sedangkan Cawagub Nomor urut 1 Boymab Harun, menga-

takan membangun kalbar tidak bisa hanya mengandalkan APBD Kalbar yang jumlahnya sekitar Rp 5 triliun. “Ini saatnya masyarakat harus cerdas. Bahwa membangun Kalbar tidak bisa hanya bergantung dengan APBD, konsep pertama yang dilakukan kita harus bekerja sama dengan segala komponen untuk dapat memekarkan daerah di Kalbar,” ujarnya.

Pasangan nomor urut 2 Karolin Margret Natasa-Suryadman Gidot berkomitmen mewujudkan Kalbar yang bekerja dan berdaya. “Kalbar Bekerja dan berdaya itu spirit kami, enam kali Kalbar meraih WTP dan pertumbuhan ekonomi Kalbar 2016 lebih tinggi dari Nasional. Maka dengan itu kita akan membangun pemerintahan yang akuntabel,” ujar Karol.

Menurut Karolin-Gidot fokus dan orientasi pembangunan adalah hak untuk semua manusia. Oleh karena pembangunan daerah tidak terlepas dari Pembangunan Nasional. “Sinergi dengan pemerintah pusat yaitu bekerja bersama dengan pemerintah pusat. Salah satu buktinya adalah sembilan kali presiden Jokowi datang ke Kalbar,” ujar Karolin.

Sementara dalam rangka penegakan hukum, jika terpilih pasangan Karolin-Gidot berkomitmen meningkatkan kerjasama antara Pemprov dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan demikian pencegahan korupsi di Kalbar akan dapat diatasi.

Selain itu Karolin dan Gidot juga akan meningkatkan LHKPN dan triminasi, tunjangan kinerja serta mendorong pembuktian harta terbalik bagi seluruh Aparatur Sipil Negara yang bertugas mengurus anggaran dan pemerintah. “Sehingga kita bisa memperkecil kemungkinan terjadinya tawar-menawar, transaksi dan sebagainya dalam proses pemerintahan di Kalimantan

Barat,” ujarnya.

Menanggapi pertanyaan mengenai keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kalbar untuk mewujudkan pembangunan di Kalimantan Barat, pasangan Karolin-Gidot menegaskan mereka akan mengoptimalkan sinergitas dengan pemerintah pusat untuk mengatasi hal tersebut. Menurut Karolin sebelumnya juga sudah mereka lakukan, hal itu terbukti dengan dibangunnya Jembatan Pak Kasih di Tayan.

Sedangkan untuk tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi di kalangan Pemprov Kalbar, pasangan Karolin-Gidot akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern. “Untuk itu kami akan berorientasi pada manajemen pemerintah yang modern. Yang sesuai dengan keinginan masyarakat karena rakyat menginginkan pemerintahan yang melayani. Bukan arogan dan bertele-tele tapi yang responsif,” ujarnya.

Dalam rangka menciptakan pusat ekonomi baru dan memperbaiki ketimpangan distribusi ekonomi di Kalbar, pasangan ini berkomitmen mengembangkan UMKM dan Mendorong Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). “Kita perlu mendorong pertumbuhan dari pertanian seperti bibit unggul, pupuk tersedia, alat-alat, obat-obatan dan memberikan pendampingan. Mendorong Badan Usaha Milik Desa, dan pengembangan Credit Union,” ujar Cawagub nomor ueut 2, Suryadman Gidot.

Selain itu mereka juga akan konsen Membangun pertanian yang ada di kampung-kampung karena itu akan meningkatkan daya beli masyarakat.

Pasangan nomor urut 3, Sutarmidji-Ria Norsan mengatakan, jika terpilih sebagai gubernur maka ia akan menggratiskan pendidikan sampai tingkat SMA. Mana-

jemen keuangan menurut Sutarmidji harus dikelola jangan hanya berbicara keterbatasan anggaran.

Sutarmidji juga mengatakan APBD Kalbar yang terbatas bukan berarti tidak bisa mempercepat pembangunan. Melakukan sinergitas dengan pihak swasta dan masyarakat sipil untuk membangun sehingga tak mengandalkan APBD sudah dilakukan Pemkot Pontianak selama ini dan itu akan dilakukan di Kalbar. “Kalau kami jadi gubernur dan saya pastikan alokasi APBD itu akan disusun minimal 60 persen belanja langsung dan lebih dari 30 belanja modal,” ujar Midji

Sementara itu Cawagub Kalbar nomor urut 3, Ria Norsan mengatakan saat ini Kalbar belum bisa memanfaatkan secara maksimal Sumber Daya Alam (SDA) yang ada. Hal itu terlihat dengan masih mengekspor bahan mentah keluar negeri. Sehingga tak memberikan banyak manfaat untuk masyarakat. Jika terpilih Norsan berjanji menjadikan bahan mentah ini menjadi bahan setengah jadi dan bahkan akan menjadi bahan jadi.

Usai debat publik, Ketua KPU Kalbar Ramdan memberikan apresiasi kepada tiga paslon gubernur dan wakil gubernur Kalbar yang sudah dengan tertib menjalani debat publik putaran terakhir. “Termasuk di antaranya para pendukung masing-masing paslon juga tertib mengikuti jalannya debat dari awal hingga akhir,” ujarnya.

Ia berterima kasih kepada seluruh pejabat pemerintah provinsi, pihak kepolisian dan TNI yang juga ikut mengawal dan mendukung kesuksesan pelaksanaan debat putaran terakhir. Ramdan menyampaikan rasa syukur bahwa seluruh pelaksanaan debat terakhir berjalan lancar dan sukses. **(oni/dan/one)**